

Nama : Yogi Rohahani (2313031031)
: Dyah Wulan Handayani (2313031056)

Kelas : B

Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Mega Metalia, SE, M.Si., MSAk., Ak

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd

Notulensi Kelompok 7 (Penentuan Harga Sektor Publik / Public Service Charge)

Ringkasan Materi Presentasi

Kelompok 7 mempresentasikan makalah mengenai Public Service Charge (PSC) adalah penetapan tarif untuk layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya bukan mencari keuntungan, tetapi memastikan layanan tetap berjalan, terjangkau, dan adil. Penetapan harga didasarkan pada biaya penyediaan layanan, kemampuan masyarakat membayar, serta kebijakan sosial pemerintah. Tarif bisa berbentuk full cost, marginal cost, atau disubsidi agar layanan publik tetap mudah diakses.

Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1 (M Jibril Ramadhan):

Mengapa Pemerintah Perlu menerapkan kebijakan charging for service pada pelayanan publik tertentu, padahal tujuan utama sektor publik bukan mencari keuangan?

Jawab : Meskipun sektor publik bersifat nonprofit (tidak mengejar laba), keberhasilan kinerjanya tetap dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Efektivitas: Apakah program pemerintah mencapai tujuan, misalnya bantuan sosial tepat sasaran
2. Efisiensi: Apakah dana publik digunakan dengan hemat tanpa pemborosan
3. Transparansi: Apakah laporan penggunaan dana terbuka untuk masyarakat
4. Akuntabilitas: Apakah pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan anggaran
5. Dampak sosial: Apakah kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Jadi, ukuran sukses sektor publik adalah kepuasan dan kesejahteraan masyarakat, bukan laba finansial seperti di sektor swasta.

Pertanyaan 2 (Fajriyatur Rohmah):

1. Apakah metode penentuan harga sektor publik benar-benar diterapkan di Indonesia?
2. Apakah ada taksiran khusus berapa persen nya dalam pembagian hasil dari pendapatan sektor publik?

Jawab:

1. Ya. Metode seperti *full cost recovery* dan *marginal cost pricing* sudah diterapkan, terutama pada layanan PDAM, transportasi publik, dan retribusi daerah. Namun praktiknya belum konsisten karena kendala biaya, regulasi, dan kemampuan bayar masyarakat.
2. Tidak ada persentase baku secara nasional. Kontribusi retribusi dan tarif layanan publik berbeda-beda tiap daerah dan jenis layanan, sehingga tidak bisa ditetapkan angka persen yang umum.

REKAPAN POST TEST KELOMPOK 7

NO	NAMA	NPM	NILAI
1	YOGI ROHANI	2313031031	94
2	IRENIUS JUNI NUGROHO	2313031032	80
3	DYAH WULAN HANDAYANI	2313031033	Presentator
4	ADEA APRILIA	2313031034	80
5	ZAHRA SYAFITRI TUNNISIA	2313031035	91
6	FATRIA IRAWAN	2313031036	86
7	BAGAS MUHAMAD SATRIA	2313031037	80
8	ZULFA SALSABILLAH	2313031038	80
9	DAFFA RAIHAN SHOFWAN SUTANTO	2313031039	77
10	ERI ZENTA ZIKRA BIRAMA PUTRI	2313031040	88
11	EPRI ANDINI	2313031041	Tidak mengambil mata kuliah ASP
12	QONITA NURUL IZZAH	2313031042	85
13	IGHA MAWARDHANI	2313031043	90
14	ADELLA PUTRI RIZKA	2313031044	86
15	MUHAMMAD JIBRIL RAMADHAN	2313031045	80
16	ALENDI TRI ANGGARA PUTRA	2313031046	77
17	FANI DIMAS PRASETYO	2313031047	Presentator
18	FAJRIYATUR ROHMAH	2313031048	86
19	NELA AMELIA	2313031050	90
20	INTAN ROMALA SARI	2313031051	80
21	RIKA RAHAYU	2313031052	85
22	ELSA TRIANANDA	2313031053	93
23	RAJA POWER SAMOSIR	2313031054	74
24	NUR AYU DILA	2313031055	80
25	LILIN RATNA SARI	2313031056	93
26	DITA SILVIANA PUTRI	2313031057	88

